

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN
yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia 2020-2022)**

SKRIPSI



OLEH

MISYKAATUL MUNIRAH

105731100820

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2024

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**PENGARUH KEPEMILIKAN NEGARA TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA
PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA 2020 – 2022)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

MISYKAATUL MUNIRAH

NIM:105731100820

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, tetapi tentang seberapa banyak kita belajar dan tumbuh di sepanjang perjalanan"

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

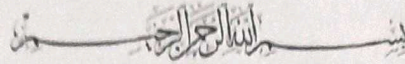
Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku yang senantiasa mempercayai kemampuanku dan memberikan dukungan tanpa henti

PESAN DAN KESAN

"Mengerjakan skripsi ini adalah perjalanan yang penuh dengan momen manis dan pahit, seperti menciptakan lukisan dari coretan-coretan awal hingga menjadi karya utuh yang bermakna. Setiap detik yang dilalui, setiap lembar yang ditulis, dan setiap malam tanpa tidur, adalah bukti dari dedikasi dan semangat. Pengalaman ini mengajarkanku bahwa keindahan sejati ditemukan dalam proses, bukan hanya dalam hasil akhir. Terima kasih kepada semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini, menjadikannya lebih dari sekadar tugas akademis, tetapi sebuah perjalanan batin yang mendalam."



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No.295 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020 – 2022)

Nama Mahasiswa : Misykaatul Munirah
No.Stambuk/NIM : 105731100820
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

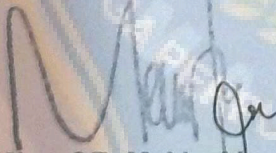
Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 20 Juli 2024 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

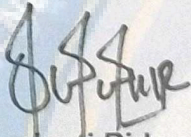
Makassar, 20 Juli 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Mira, SE, M.Ak, Ak
NIDN: 0903038803

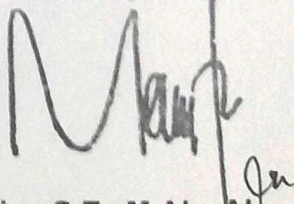

Dr. Mukminatun Ridwan, SE, M.Si
NIDN: 09190117901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis

Ketua Program Studi

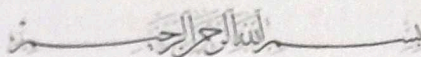

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 851 507


Mira, S.E., M.Ak., Ak
NBM: 1286 844



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No 295 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: MISYKAATUL MUNIRAH, Nim:105731100820 diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0008/SK-Y/62201/091004/2024M, Tanggal 14 Muharram 1446H/20 Juli 2024M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Muharram 1446 H

20 Juli 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT., TPU
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.ACC
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr. Ansyarif Khalid, S.E., M.Si., Ak., CA
 2. Dr. Chairul Ihsan Burhanuddin, SE., M.Ak
 3. Muttiarni, SE., M.Si
 4. Mira, SE., M.Ak., Ak

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM. 651 507



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No.295 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Misykaatul Munirah
Stambuk : 105731100820
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020 – 2022)

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil Karya Sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 20 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



MISYKAATUL MUNIRAH
NIM: 105731100820

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi

Mira, S.E., M.Ak., Ak
NBM: 1286 844

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MISYKAATUL MUNIRAH
NIM : 105731100820
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan,menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020 – 2022)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 20 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



MISYKAATUL MUNIRAH
NIM:105731100820

ABSTRAK

MISYKAATUL MUNIRAH, 2024. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020 – 2022). Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Mira dan Mukminati Ridwan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020 – 2022 www.idx.co.id . Populasi dari penelitian ini merupakan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode *purposive sampling* sehingga didapatkan sampel sebanyak 27 perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian data dengan menggunakan perhitungan statistik *Eviews 12* diperoleh kesimpulan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan adanya kepemilikan institusional pada BUMN dengan jumlah kepemilikan yang tinggi menjadikan penghindaran pajak dalam perusahaan tersebut juga tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena kepemilikan institusional dalam BUMN memberikan kewenangan kepada Negara untuk mengatur penghindaran pajak dalam bentuk *tax planning*.

Kata Kunci : Kepemilikan Institusional, Penghindaran pajak

ABSTRACT

MISYKAATUL MUNIRAH, 2024. *The Effect of Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study on State-Owned Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2020 – 2022)*. Thesis. Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University Of Makassar. Supervised by: Mira and Mukminatid Ridwan.

This study aims to determine the effect of Institutional Ownership on Tax Avoidance in State-Owned Companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2020 – 2022 www.idx.co.id. The population of this study is state-owned companies listed on the IDX. The samples in this study were taken by purposive sampling method so that samples were obtained as many as 27 companies. The type of data used is secondary data taken from the company's annual report.

Based on the results of the data research using the statistical calculation of Eviews 12, it was concluded that Institutional Ownership has a positive effect on tax avoidance. With institutional ownership in SOEs with a high number of ownership, tax avoidance in the company is also high. This is because institutional ownership in SOEs gives the authority to the State to regulate tax avoidance in the form of tax planning.

Keywords : *Institutional Ownership, Tax avoidance*

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020 – 2022)”**

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi ini merupakan persembahan yang utama dan istimewa kepada kedua orangtua penulis Bapak Ahyat dan Ibu Sitti Nafsiah, yang dimana meskipun keduanya tidak sempat menempuh pendidikan di bangku perkuliahan namun keduanya senantiasa memberikan dukungan moral dan materil, perhatian, kasih sayang serta doa tulus untuk anak perempuan pertama-nya agar senantiasa diberikan kelancaran dalam menempuh pendidikan sampai di bangku perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat dipisahkan dari bantuan dan dorongan dari semua pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, S.E., M.Ak, Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi sekaligus dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan dukungan, meluangkan waktu dan memberikan arahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Dr. Mukminati Ridwan, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing II yang berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama berkuliah di kampus biru Unismuh Makassar.
6. Annisa Qurrata Aini dan Ahmad Naylil Murad, selaku adik penulis yang senantiasa menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Saudari Nur Insan Fajri, Miftahul Khaerat dan Nur Elmi yang senantiasa menemani dan menampung segala keluh kesah penulis.
8. Penghuni asrama unimus 301 yang senantiasa memberikan dukungan dan menjadi rekan yang baik dalam kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka.
9. Rekan – rekan dikelas konsentrasi Akuntansi Sektor Publik dan Perpajakan yang juga senantiasa menemani dalam suka maupun duka.
10. Kepada Saudari Fenti Nurjayanti, Nurul Aini L dan Nia Wahyuni yang senantiasa membersamai penulis.
11. Teruntuk orang – orang yang pernah ada dalam kehidupan penulis yang banyak memberikan ilmu dan pelajaran hidup, sehingga menjadikan penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, yang tidak mampu penulis tuliskan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah – mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, terkhusus rekan – rekan se-almamater tercinta.

Billahi fii sabilil Haq, Fastabiqul Khaerat, Wassalamu Alaikum wr.wb

Makassar, 26 Mei 2024

Misykaatul Munirah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II	27
TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Teori	27
B. Kepemilikan Institusional	29
C. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	30
D. TINJAUAN EMPIRIS	34
E. Kerangka Pikir	46
F. Hipotesis	46
BAB III	27
METODE PENELITIAN	27
A. Lokasi dan waktu penelitian	27
B. Jenis Penelitian	27
C. Definisi Operasional dan Pengukuran	27

D. Jenis dan Sumber data	28
E. Populasi dan Sampel	28
1. Populasi	28
2. Sampel.....	29
F. Metode pengumpulan data	31
G. Teknik Analisis	32
BAB IV	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	36
B. Hasil Penelitian	57
C. Pembahasan Hasil Penelitian	64
BAB V	68
PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran	27
Tabel 3. 2 Kriteria Sampel.....	29
Tabel 3. 3 Daftar Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI.....	29
Tabel 3. 4 Hipotesis Uji Autokolerasi	34
Tabel 4. 1 Deskripsi Data Penelitian	58
Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	60
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas	61
Tabel 4. 4 Hasil Uji Heterokedastisitas	62
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokolerasi	62
Tabel 4. 6 Hasil Uji t	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	46
---------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah terus berupaya untuk mensejahterahkan rakyatnya, yang dimana dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, dibutuhkan biaya yang bersumber dari penerimaan negara. Dalam penelitian (Amran, 2020) menyatakan bahwa 80% penerimaan negara yang digunakan sebagai pembiayaan bersumber dari pajak. Definisi pajak dalam Undang – Undang No. 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia, sehingga pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, yang kemudian digunakan untuk belanja Negara (Binga et al., 2019). Penerimaan pajak untuk periode Januari sampai dengan Juni 2023 mengalami pertumbuhan yang positif. Penerimaan pajak Negara mencapai angka Rp.1.387,78 T (<https://media.kemenkeu.go.id>).

Salah satu obyek pajak di Indonesia adalah wajib pajak badan (perusahaan). Yang dimana sebagian besar perusahaan tersebut adalah Badan Usaha yang dimiliki oleh Negara, atau yang lebih dikenal dengan sebutan BUMN. Kepemilikan Intitusional pada perusahaan BUMN tentunya memberikan indikasi bahwa pemilik saham terbanyak adalah Negara (Shelvi et al., 2022). Penerimaan pajak oleh Negara selama ini mengalami

peningkatan, salah satunya hasil dari pajak yang disetorkan oleh wajib pajak badan. Namun, peningkatan pajak tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Menurut (Moeljono, 2020) dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah banyak mengambil langkah – langkah intensif dan ekstensif. Langkah intensif yang diambil yaitu dengan menyempurnakan administrasi perpajakan, peningkatan kualitas pemungut pajak, serta penyempurnaan peraturan perpajakan yang berlaku. Adapun langkah ekstensif yang diambil pemerintah yaitu dengan memperluas cakupan wajib pajak dan membenaran tarif pajak. Dari banyaknya langkah yang diambil pemerintah, tidak dapat dipungkiri masih banyak kendala yang harus dihadapi, salah satunya rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta penggelapan pajak (*tax evasion*).

(Moeljono, 2020) menyatakan bahwa Penghindaran pajak (*tax avoidance*) berarti suatu tindakan legal dengan mencari celah hukum dan undang – undang perpajakan, guna meminimalisir jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban individu maupun entitas bisnis. Upaya Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak sebagian didasari oleh pemahaman tentang pajak yang tidak selalu proporsional akibatnya pajak lebih dimaknai sebagai beban dan kewajiban, sehingga siapapun berusaha untuk tidak kooperatif bahkan menghindar dari beban dan kewajibannya (BARLI, 2018). Meskipun tindakan tersebut tidak melanggar aturan, tetap saja tindakan ini tidak dibenarkan, dikarenakan dapat menimbulkan kerugian bagi Negara. Praktik penghindaran pajak ini acap kali dilakukan oleh wajib pajak, baik itu

wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam hal ini yang berbentuk perusahaan. Sebagian besar perusahaan menganggap bahwasanya besaran pajak yang harus dibayarkan itu sebagai beban bagi perusahaannya, sehingga perusahaan mencari celah hukum perpajakan agar pajak yang dibayarkan lebih rendah dan laba yang diperoleh lebih maksimal (Ayu & Sumadi, 2019).

Kasus penghindaran pajak bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Sebagaimana yang dipublikasikan dalam (<https://www.kompasiana.com/>) bahwa PT Adaro Energy Tbk melakukan praktik penghindaran pajak dengan metode *Transfer pricing* yang telah dilakukan mulai tahun 2009 – 2017, kemudian terungkap pada tahun 2019. Metode *Transfer pricing* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional dengan melakukan transaksi Internasional (Wijaya & Hidayat, 2022). Kasus selanjutnya adalah kasus yang dilaporkan oleh Bappenas pada tahun 2012, setidaknya pada tahun 2005, sebanyak 750 perusahaan Penanam Modal Asing diduga menggunakan penghindaran pajak dengan menyampaikan rugi selama lima tahun berturut-turut yang menyebabkan mereka tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya kasus PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia memulai penghindaran pajak pada tahun 2005 dan kasus mulai diadili pada tahun 2007, serta Bentoel Internasional Investama, perusahaan tembakau milik British American Tobacco (Pramesty et al., 2020).

Kepemilikan Intitusional dalam perusahaan BUMN ini memunculkan beberapa spekulasi dari masyarakat, masyarakat berspekulasi bahwa perusahaan tersebut tidak menjalankan kewajiban

perpajakannya. Masyarakat menganggap bahwa kepemilikan institusional dalam perusahaan ini, menjadi suatu hak istimewa (*previlage*) yang diterima sehingga perusahaan tidak perlu membayar pajak. Namun, spekulasi ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hilling et al., 2021), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun perusahaan tersebut merupakan milik negara, tidak menjadikan itu sebuah alasan untuk tidak membayar pajak dan atau melakukan penghindaran pajak nol. Penelitian (Ayu & Sumadi, 2019) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dengan adanya kepemilikan institusional maka tingkat pengawasan dalam suatu perusahaan juga mengalami peningkatan yang mampu menimbulkan tindak kecurangan.

Di Indonesia sendiri sudah banyak penelitian yang membahas terkait pengaruh kepemilikan Institusional dan penghindaran pajak, namun belum banyak yang mengambil sampel dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga peneliti merasa perlu untuk meneliti secara lebih dalam terkait **“Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020 – 2022)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan yaitu, Apakah Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020 - 2022?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020 - 2022.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dapat diperoleh berdasarkan tujuan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020 - 2022.
2. Bagi akademis, diharapkan dapat bermanfaat menambah pengetahuan, informasi dan wawasan mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020 - 2022.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi terkait dengan penelitian yang serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Thoery*)

Teori Keagenan merupakan teori yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976). yang menjelaskan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen. Teori ini adalah perspektif yang menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan. Munculnya teori keagenan dikarenakan adanya dua kepentingan yang berbeda dalam perusahaan (Binga et al., 2019) dalam (Gouwvara & Susanty, 2023). Manajemen perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan harus mendahulukan kepentingan pemilik yaitu dengan meningkatkan kemakmuran pemegang saham, meskipun begitu manajemen sering memiliki kepentingan yang berbeda-beda dengan kepentingan pemegang saham sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Permasalahan yang terjadi antara manajemen dan pemilik modal mengakibatkan munculnya biaya.

(Jensen & Meckling, 1976) menyatakan konflik kepentingan yang memunculkan biaya didefinisikan sebagai biaya keagenan menjadi tiga jenis biaya, yaitu:

- 1) Biaya monitoring, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi segala aktivitas yang dilakukan oleh agen. Biaya-biaya yang terkait dengan monitoring menjadi tanggung jawab dari principal.
- 2) Biaya bonding, yaitu biaya yang dikeluarkan sebagai jaminan bahwa agen tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan. Biaya-biaya yang termasuk sebagai biaya bonding menjadi tanggung jawab dari agen.
- 3) Biaya residual loss, yaitu biaya yang diukur dari nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami principal akibat terjadinya perbedaan kepentingan.

Teori ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini mengacu pada tujuan yang ingin dicapai penulis, yaitu untuk mengetahui apakah pengaruh kepemilikan institusional terhadap tindakan penghindaran pajak terkhusus bagi perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan teori ini berfokus terhadap pengungkapan konflik kepentingan. Yang dimana penelitian ini dalam penelitian ini yang bertindak sebagai prinsipal adalah pemegang saham tertinggi (Negara) dan agen yaitu manajemen perusahaan. Diketahui pula bahwa kepemilikan institusional terkhusus BUMN memberikan indikasi bahwa saham yang ada didalam perusahaan tersebut sebagian besar dimiliki oleh Negara/Pemerintah. Hal ini lah yang ingin diungkapkan oleh peneliti, peneliti ingin mengungkap apakah dengan adanya kepemilikan

institusional, menjadi suatu indikasi akan terjadinya konflik kepentingan bagi Negara/Pemerintah, sehingga Negara/pemerintah berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin ataukah meskipun sahamnya sebagian besar dipegang Negara/pemerintah, tidak menjadi alasan untuk menghindari kewajiban perpajakannya guna meningkatkan laba perusahaan.

B. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga seperti bank, perusahaan dan lain – lain (Dewi & Abundanti, 2019). Kepemilikan institusi yang di pegang oleh pemerintah pada perusahaan BUMN memberikan indikasi bahwa persentase nilainya lebih besar daripada jumlah saham yang beredar dan di jual secara terbuka. Dengan persentase kepemilikan yang tinggi, yaitu minimal di angka 51% ini memberikan kewenangan kepada negara dalam hal ini pemerintah, untuk membuat kebijakan, mengendalikan, dan mengelola perusahaan tersebut, guna memastikan kebijakan tersebut sejalan dengan kepentingan rakyat (Trisakti, 2023). Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Yu, 2013) yang menyatakan bahwa tingkat pengendalian yang tinggi oleh pemerintah menunjukkan bahwa kepemilikan saham pemerintah juga mendominasi. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah/negara disebut Badan Usaha Milik Negara.

UU No. 19 Tahun 2003 pasal 1, Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun

laba yang didapatkan dari badan usaha ini sebesar – besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Untuk menghitung besarnya kepemilikan institusional (INST) dalam suatu perusahaan digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{INST} = \frac{\text{Kepemilikan saham institusi}}{\text{Total saham perusahaan}} \times 100\%$$

C. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

(Aisyah, Rika. Soekardan, 2017) menyatakan Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang pungutannya bersifat wajib, tetapi wajib pajak tidak selalu melaksanakan kewajiban perpajakannya karena pembayaran pajak dengan tarif tertentu menjadi pengurang dari penghasilan wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak sering berusaha untuk mengurangi beban pajak dengan menggunakan praktik penghindaran pajak (Sari et al., 2023). Dalam usahanya melakukan praktik penghindaran pajak, wajib pajak ini mempunyai berbagai macam cara, (Ayuningtyas, 2012) dalam (Ayu & Sumadi, 2019) menyatakan menahan diri, pindah lokasi, dan penghindaran pajak secara yuridis adalah beberapa cara umum untuk menghindari pajak. Hal ini juga tentunya merugikan negara, karena sumber pendapatan terbesar negara berasal dari pungutan pajak.

Penghindaran pajak merupakan suatu kegiatan perlawanan dilakukan oleh wajib pajak sebelum SKP (Surat Ketetapan Pajak) dikeluarkan. Wajib pajak melakukan penghindaran pajak untuk menghindari dan atau mengurangi kewajiban pajak mereka. Karena aturan pajak di Indonesia belum secara resmi mengatur penghindaran pajak,

penghindaran pajak ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal, pemerintah tentunya mengalami kerugian sebagai akibatnya, kerugian yang dimaksud adalah ketidaksesuaian antara pajak yang diterima pemerintah dan target penerimaan (Selistiaweni et al., 2020) Bila perusahaan mengurangi jumlah pembayaran pajaknya dan tanpa perlu melanggar aturan dari perpajakan itu merupakan kesimpulan dari definisi penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan pengendalian penghasilan yang sah yang tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar (Sujannah, 2021).

Penghindaran pajak yang diperbolehkan adalah dengan menggunakan celah hukum Undang – Undang Perpajakan, yaitu perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Hal ini dimaksudkan untuk meminimumkan kewajiban membayar pajak (Antari Yuliana et al., 2023). Dalam pelaksanaan perencanaan pajak, sangat diperlukan pengetahuan yang baik mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar tidak terjebak dalam masalah penyulupan pajak (*tax evasion*) atau upaya lainnya dalam masalah penyelundupan pajak (Angelia, 2020). Contoh perlindungan pajak yang dilegalkan undang – undang yaitu seperti pemanfaatan insentif pajak, pemanfaatan potongan dan kredit pajak, pengaturan waktu penghasilan dan pengeluaran, strukturisasi transaksi, pemanfaatan status perpajakan yang berlaku dan penggunaan rencana pensiun dan asuransi.

Skema penghindaran pajak yang acap kali ditemukan terutama dalam perusahaan multinasional adalah, sebagai berikut :

1. *Transfer Pricing*

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan yang di buat perusahaan guna menentukan harga transfer transaksi baik barang, jasa, harta tak berwujud, dan atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan oleh suatu perusahaan (Mulyani et al., 2020). Dalam penelitian (Putri, 2019) menyebutkan bahwa *Transfer pricing* adalah transaksi barang dan jasa perusahaan multinasional antara beberapa divisi dalam kelompok bisnis dengan harga yang tidak wajar, yang dilakukan dengan menaikkan harga atau menurunkan harga. Dalam penelitian (Sujannah, 2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* dilakukan perusahaan untuk untuk mengakali jumlah laba yang dihasilkan perusahaan agar pajak yang disetorkan ke Negara lebih rendah.

2. *Treaty Shopping*

Treaty Shopping merupakan suatu kegiatan penyalahgunaan kebijakan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah perjanjian perpajakan yang di tetapkan dua negara, yang dimana hal ini bertentangan dengan maksud dan tujuan dari dibuatnya *tax treaty* (Perjanjian Perpajakan) (Putra & Rahayu, 2023). Dalam penelitian (Kurniawan & Rahayu, 2022) disebutkan bahwa wajib pajak melakukan praktik *treaty shopping* agar mendapatkan pengurangan tarif deviden, bunga dan royalti. Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan dari

pemerintah itu sendiri yang terus berupaya untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak secara berganda yang melibatkan dua negara. Namun, untuk mencegah praktik – praktik *treaty shopping* pemerintah terus membuat aturan terkait hal tersebut, agar kemudian perjanjian penghindaran pajak berganda ini dapat dinikmati oleh penerima manfaat yang seharusnya (*beneficial owner*) (Fitnawati Wn et al., 2024).

3. *Controlled Foreign Corporation (CFC)*

Praktik penghindaran pajak dengan metode ini dilakukan dengan mendirikan entitas diluar negeri dimana wajib pajak dalam negeri memiliki kendali dalam negara tersebut. Wajib pajak dalam negeri menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada pemegang saham dengan tujuan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus disetorkan kepada negara (Rahayu, 2011). Dalam penelitian (Fitnawati Wn et al., 2024) menyatakan bahwa tujuan lain dari CFC adalah untuk memberi negara kewenangan untuk memungut pajak atas sisa laba atau dividen yang diperoleh oleh pemegang saham yang memiliki perusahaan dan menjalankan bisnisnya di luar negeri. Jika perusahaan di luar negeri didirikan di negara yang tidak dikenakan pajak, upaya di atas dapat bermanfaat bagi bisnis mereka (Wahyuni et al., 2024)

4. *Thin Capitalitazion*

Thin Capitalization merupakan suatu skema yang diterapkan perusahaan guna meminimalisir beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman berupa utang daripada modal yang disetorkan

yang berasal dari wajib pajak itu sendiri. Skema ini diterapkan entitas (wajib pajak) karena bunga yang dibayarkan atas utang yang terjadi bisa menjadi pengurang pajak yang harus dibayarkan oleh entitas tersebut. Jika utang suatu perusahaan meningkat, beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan akan berkurang. Ini karena pembayaran bunga dapat menjadi pengurang pajak sedangkan pembayaran dividen tidak dapat menjadi pengurang pajak (Gouwvara & Susanty, 2023). Efek makro dari pengurangan seperti ini adalah penurunan potensi pendapatan negara dari pajak (Salwah & Herianti, 2019). Terjadinya praktik *thin capitalization* juga dapat menimbulkan insentif pajak. *Thin capitalization* bisa membuat sebuah masalah bagi perpajakan karena adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan investasi utang (Selistiaweni et al., 2020)

Salah satu cara yang dilakukan untuk mengukur tindakan penghindaran pajak oleh suatu entitas yaitu dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) atau tarif pajak efektif (Gouwvara & Susanty, 2023).

D. TINJAUAN EMPIRIS

Berikut merupakan ringkasan dari penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian yang akan dilakukan,

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian

1.	Ivone Ivone, Hendry Tinamo/ 2021	Pengaruh kepemilikan negara, hubungan politik dan penghindaran pajak terhadap kinerja keuangan di Indonesia	Kuantitatif, regresi linear berganda	SPSS & Eviews	Hasil dari pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan negara, hubungan politik berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Penghindaran pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap tetapi berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA dan ROE.
2.	Adriyanti Agustina Putri, Nadia Fathurrahmi Lawita/2019	Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak	Kuantitatif, Regresi panel	SPSS	Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.
3.	Anders Vilhelmsson e,y Axel Hilling a Frederik Lundtofte b,c	<i>Tax avoidance and state ownership — The case of Sweden</i>	Kuantitatif, Regresi panel	SPSS	Hasil analisis menunjukkan meskipun tidak ada kepemilikan negara, perusahaan tidak akan selalu memilih kebijakan pajak yang

	Niklas Sandell, Amanda Sonnerfeldt/ 2021				meminimalkan pajak. Selanjutnya, kepemilikan negara mayoritas umumnya tidak akan menghasilkan penghindaran pajak nol.
4.	Dudi Pratomo, Risa Aulia Rana/2021	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak	Kuantitatif, Analisis data panel	E-views 10	Hasil pengujian analisis menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, serta komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak secara simultan. Pengujian secara parsial menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit tidak berpengaruh

					terhadap penghindaran pajak.
5.	Noor Mita Dewi/2019	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016	Kuantitatif	SPSS	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016 sehingga hipotesis diterima. Dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2016 sehingga hipotesis diterima. Komite audit tidak berpengaruh

					<p>signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016, sehingga hipotesis ditolak. Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2016 sehingga hipotesis diterima.</p>
6.	Hafez Sadam Asturbewa, Reni Oktavia /2023	Indikasi Perusahaan BUMN Melakukan Penghindaran Pajak	Kuantitatif, statistik deskriptif, uji asumsi klasik	SPSS	<p>Berdasarkan hasil uji firm size dan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dan untuk nilai ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, akan tetapi firm size tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>

7.	Ni Koming Ayu Praditasari, Putu Ery Setiawan /2017	Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance	Kuantitatif, analisis regresi linear berganda	SPSS	Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada tax avoidance serta leverage dan profitabilitas berpengaruh positif pada tax avoidance. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh pada tax avoidance.
8.	Rizki Afrika /2021	Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak	Kuantitatif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda	SPSS 22	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terlihat bahwa kepemilikan institusional mampu menjadi alat monitoring yang efektif bagi perusahaan, sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan manajemen dan menunjukkan lebih sedikit penghindaran pajak yang terjadi karena investor institusi melakukan lebih banyak pengawasan, cenderung lebih berhati-hati bahkan mengurangi kegiatan penghindaran pajak tersebut.

9.	Moeljono /2020	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak	Kuantitatif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda	SPSS	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, leverage ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional dan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
10.	Wildan Dwi Lastyanto, Doddy Setiawan /2022	Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia (2017-2019)	Regresi linear berganda	SPSS	Hasil penelitian memberikan bukti bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan dan negatif dengan penghindaran pajak. Semakin besar kepemilikan maka tindakan penghindaran pajaknya juga semakin besar. Tax avoidance dengan proksi CFETR dapat diartikan bahwa investor institusional mengabaikan fungsi pemantauan, mereka lebih fokus untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dan mendorong melakukan praktik penghindaran pajak. Keterbatasan

Penelitian (Ivone & Tinamo, 2021) yang berjudul “Pengaruh kepemilikan negara, hubungan politik dan penghindaran pajak terhadap kinerja keuangan di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode

regresi linear berganda pada data panel untuk menguji setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan 165 sampel perusahaan yang tercatat di BEI yang memenuhi kriteria sampel yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dampak dari kepemilikan negara, hubungan politik dan penghindaran pajak terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang tercatat di BEI tahun 2016 – 2020. *Cash ETR* merupakan variabel independen sedangkan variabel dependennya adalah rasio ROA, dan ROE yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan.

Penelitian (Ayu & Sumadi, 2019) yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Instusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak”, Teknik yang dilakukan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah purposive sampling. Sebanyak 33 perusahaan lolos sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia runtun waktu periode tahun 2013-2017. Metode yang digunakan berupa metode kuantitatif dengan alat analisis regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian (Hilling et al., 2021) yang berjudul “*Tax avoidance and state ownership - The case of Sweden*”. Menggunakan regresi panel pada seluruh populasi yang merupakan perusahaan milik negara dan publik di Swedia tahun 2000 – 2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada kepemilikan saham negara, perusahaan tidak akan

selalu memilih kebijakan perpajakan yang meminimalkan pajak. Sebaliknya, kepemilikan mayoritas negara pada umumnya tidak akan menghasilkan penghindaran pajak nol, penelitian ini juga menemukan peningkatan standar deviasi dalam kepemilikan negara meningkatkan pembayaran pajak perusahaan sekitar 14%.

Penelitian (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021) yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak”. Data yang diambil bersumber dari laporan keuangan perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015 - 2018 Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan memperoleh 21 perusahaan yang sesuai kriteria. analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan Eviews. Hasil pengujian analisis menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, serta komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak secara simultan. Pengujian secara parsial menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian (Mita Dewi, 2019) yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016”. Menggunakan metode kuantitatif dengan alat uji SPSS, dan hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan

terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016 sehingga hipotesis diterima. Dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2016 sehingga hipotesis diterima. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016, sehingga hipotesis ditolak. Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2016 sehingga hipotesis diterima.

Penelitian (Sadam Asturbewa & Oktavia, 2023) yang berjudul “Indikasi perusahaan BUMN melakukan Penghindaran Pajak” Penelitian ini menggunakan data yang diambil di Annual Report dan laporan keuangan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2020. Yang mana populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu sebanyak 24 perusahaan BUMN. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. Serta Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian menggunakan uji-f dan uji-t.

Penelitian (Koming & Praditasari, 2017) berjudul “Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance”. Penelitian ini berfokus pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada tax avoidance serta leverage dan profitabilitas berpengaruh positif pada tax avoidance. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh pada tax avoidance.

Penelitian (Afrika, 2021) berjudul “Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak”. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 74 Perusahaan sektor Industri Dasar dan Kimia dan 48 Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI 2016 – 2019. Alat analisis menggunakan SPSS 22 dan memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terlihat bahwa kepemilikan institusional mampu menjadi alat monitoring yang efektif bagi perusahaan, sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan manajemen dan menunjukkan lebih sedikit penghindaran pajak yang terjadi karena investor institusi melakukan lebih banyak pengawasan, cenderung lebih berhati-hati bahkan mengurangi kegiatan penghindaran pajak tersebut.

Penelitian (Moeljono, 2020) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode *purposive sampling* dengan sampel 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011 – 2018. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, leverage ukuran perusahaan, kompensasi rugi

fiskal, kepemilikan institusional dan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yakni ROA, Leverage, Size, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional dan Risiko Perusahaan, dapat disimpulkan bahwa faktor ROA, Leverage, Size, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional dan Risiko Perusahaan, tidak berpengaruh signifikan pada Perusahaan- perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2018.

Penelitian (Lastyanto & Setiawan, 2022) yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia (2017-2019)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada sektor property dan real estate yang terdaftar pada BEI periode 2014 – 2017, dengan jumlah sampel 11 perusahaan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode purposive sampling. Teknis analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Dengan perolehan hasil analisis yang menyatakan bahwa profitabilitas dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan likuiditas dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

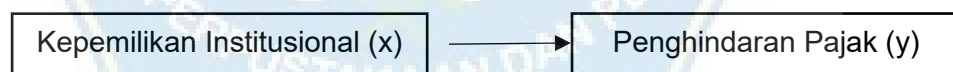
Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian ini menggunakan metode kuantitatif alat analisis statistik deskriptif dengan bantuan program Eviews, serta sampel penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian

sebelumnya sampel yang digunakan umumnya adalah perusahaan dari sektor pertambangan, sektor barang konsumsi, perbankan dan perusahaan terdaftar di BEI. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel seluruh Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 - 2022. Selain itu, penghindaran pajak pada penelitian ini juga akan diukur menggunakan Metode *Effective Tax Rate (ETR)*.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran dan visualisasi dari hubungan atau keterkaitan antar konsep atau variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pikir ini digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Penelitian dilakukan dengan mengkaji terkait pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak dengan studi kasus perusahaan BUMN. Analisis tersebut digambarkan sebagai berikut,

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir



F. Hipotesis

Hipotesis adalah penjelasan sementara tentang suatu tingkah laku, gejala - gejala atau kejadian tertentu yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Dalam tataran praktis hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan,

belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian dan bukan jawaban empiris.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran pajak

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga seperti bank, perusahaan dan lain – lain (Dewi & Abundanti, 2019). Dalam hal ini kepemilikan institusi pada BUMN dipegang oleh negara. Kepemilikan negara yang tinggi menunjukkan persentase jumlah saham yang dimiliki pemerintah lebih besar daripada penanam saham yang lain (Eforis, 2017).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hilling et al., 2021) yang berjudul “*Tax avoidance and state ownership - The case of Sweden*” memperoleh hasil bahwa meskipun perusahaan tersebut milik negara, perusahaan tidak dapat melakukan penghindaran pajak nol. Penelitian (Ayu & Sumadi, 2019) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dengan adanya kepemilikan institusional maka tingkat pengawasan dalam suatu perusahaan juga mengalami peningkatan yang mampu menimbulkan tindak kecurangan Berdasarkan penelitian ini hipotesis yang diajukan yaitu :

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id/id>) dan situs resmi perusahaan yang akan dijadikan sampel, dengan rentan waktu dua bulan (Januari s/d Februari 2024) setelah pelaksanaan seminar proposal.

B. Jenis Penelitian

Menggunakan jenis penelitian kuantitatif melalui analisis data sekunder. Metode penelitian asosiatif yang mempunyai beberapa bentuk hubungan kausalitas guna mengetahui hubungan sebab akibat, yakni variabel yang dipengaruhi dan memengaruhi.

C. Definisi Operasional dan Pengukuran

Berikut merupakan penjelasan terkait dengan definisi operasional dan pengukuran.

Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran

Variabel Independen	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran
Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Institusional merupakan suatu kepemilikan saham yang dimiliki institusi yang umumnya memonitor perusahaan, yang di	$INST = \frac{\text{Kepemilikan Saham Institusi}}{\text{Total Saham Perusahaan}} \times 100\%$ <p>Sumber : (Tambalean et al., 2018)</p>

	mana persentase nilainya lebih besar daripada jumlah saham yang beredar dan di jual secara terbuka (Mita Dewi, 2019)	
Variabel Dependen	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran
Penghindaran Pajak	Penghindaran pajak merupakan perlawanan yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari dan atau mengurangi kewajiban pajak mereka dengan menggunakan celah Undang – Undang Perpajakan (Moeljono, 2020)	$ETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum pajak}}$ <p>Sumber : (Kalbuana et al., 2017)</p>

D. Jenis dan Sumber data

Data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*Annual Report*) perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2022.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2022, yaitu sebanyak 36 perusahaan dari berbagai sektor.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian atau perwakilan dari populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* dimana sampel yang diambil memiliki kriteria tertentu (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021). Berikut adalah kriteria pengambilan sampel, yaitu :

Tabel 3. 2 Kriteria Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	36
2.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan secara konsisten di tahun 2020 - 2022	(9)
Jumlah Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian		27

Adapun daftar perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Daftar Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI

No.	Nama Perusahaan	Sektor	Sub Sektor
1.	PT Aneka Tambang Tbk	Bahan Baku	Bahan Baku
2.	PT Krakatau Steel Persero Tbk	Bahan Baku	Bahan Baku
3.	PT Semen Baturaja Persero Tbk	Bahan Baku	Bahan Baku

4.	PT Wijaya Karya Beton Tbk	Bahan Baku	Bahan Baku
5.	PT Waskita Beton Precast Tbk	Bahan Baku	Bahan Baku
6.	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	Bahan Baku	Bahan Baku
7.	PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk	Energi	Minyak, Gas Dan Batubara
8.	PT Elnusa Tbk	Energi	Minyak, Gas Dan Batubara
9.	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Infrastruktur	Telekomunikasi
10.	PT Adhi Karya Persero Tbk	Infrastruktur	Konstruksi Bangunan
11.	PT Wijaya Karya Persero Tbk	Infrastruktur	Konstruksi Bangunan
12.	PT Jasa Marga Persero Tbk	Infrastruktur	Infrastruktur Transportasi
13.	PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk	Infrastruktur	Konstruksi Bangunan
14.	PT Garuda Indonesia Persero Tbk	Infrastruktur	Infrastruktur Transportasi
15.	PT PP Presisi Tbk	Infrastruktur	Konstruksi Bangunan
16.	PT Jasa Armada Indonesia Tbk	Infrastruktur	Infrastruktur Transportasi
17.	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	Infrastruktur	Infrastruktur Transportasi

18.	PT Indofarma Tbk	Kesehatan	Farmasi & Riset Kesehatan
19.	PT Kimia Farma Tbk	Kesehatan	Farmasi & Riset Kesehatan
20.	PT Phapros Tbk	Kesehatan	Farmasi & Riset Kesehatan
21.	PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk	Keuangan	Bank
22.	PT Bank Mandiri Persero Tbk	Keuangan	Bank
23.	PT Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk	Keuangan	Bank
24.	PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	Keuangan	Bank
25.	PT Bank Tabungan negara Persero Tbk	Keuangan	Bank
26.	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	Keuangan	Asuransi
27.	PT Waskita Karya Persero Tbk	Konstruksi Bangunan	Konstruksi Bangunan

Sumber : [_ \(bumn.go.id\)](http://bumn.go.id)

F. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen yang telah ada. Data yang akan diolah diambil dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs resmi perusahaan.

G. Teknik Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan riset kausal. Menggunakan program *E-views* Dengan teknik analisis dan pengujian yang dilakukan, yaitu :

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan data dari masing-masing variabel dalam penelitian (Ayuwardani & Isroah, 2018). Statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari variabel – variabel yang akurat, yaitu Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2022.

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik harus dilakukan guna menguji apakah data sudah sesuai dengan asumsi klasik. Ini dilakukan guna menghindari terjadinya perkiraan yang bias.

a. Uji Normalitas

Salah satu komponen uji persyaratan analisis data, juga dikenal sebagai asumsi klasik, adalah uji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk menentukan apakah distribusi data sesuai atau data berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal artinya data mempunyai sebaran merata sehingga benar – benar menjadi populasi. Jika data yang dihasilkan berdistribusi normal maka pendekatan parametrik dalam analisis statistik dapat

digunakan. Sementara itu, jika data yang tidak berdistribusi normal maka analisis statistik yang dihasilkan menggunakan pendekatan nonparametrik (Nurhasanah Siti, 2017)

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dipergunakan untuk melakukan pengujian apakah di dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain (Ayuwardani & Isroah, 2018). Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan grafik scatterplot. Untuk mengetahui sebuah data tidak heteroskedastisitas yaitu apabila pada grafik tersebut tidak ada pola yang jelas serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2011).

c. Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada model tertentu dengan periode sebelumnya. Pada umumnya model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokolerasi atau tidak terjadi autokolerasi. Pengujian ini menggunakan uji *Durbin Watson (DW Test)* yang mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi antara variabel independen, dengan mekanisme pengujian sebagai berikut :

1) Merumuskan hipotesis

Ho : tidak ada autokolerasi ($r=0$)

H_a : ada kolerasi ($r \neq 0$)

- 2) Menentukan nilai d hitung (*Durbin Watson*)
- 3) Menentukan nilai batas atas (d_u) dan batas bawah (d_l) dalam tabel
- 4) Mengambil keputusan dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Hipotesis Uji Autokolerasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokolerasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokolerasi positif	<i>No decision</i>	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada autokolerasi negative	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokolerasi negative	<i>No decision</i>	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokolerasi positif maupun negative	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber : (Ghozali, 2011).

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa :

- a) Jika $0 < d < d_l$, H_0 ditolak berarti terdapat autokolerasi positif.
- b) Jika $d_l \leq d \leq d_u$, daerah tanpa keputusan (*gray area*), berarti uji tidak menghasilkan kesimpulan.
- c) Jika $4 - d_l < d < 4$, H_0 ditolak berarti terdapat autokolerasi positif.
- d) Jika $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$, daerah tanpa keputusan (*gray area*), berarti uji tidak menghasilkan kesimpulan.
- e) Jika $d_u < d < 4 - d_u$, H_0 tidak ditolak berarti tidak ada autokolerasi .

3. Uji Hipotesis

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian model. Suatu model dikatakan cukup baik dan dapat digunakan dalam memprediksi apabila telah memenuhi uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian variabel secara parsial (Uji T).

Uji ini dilakukan untuk menguji t signifikansi pengaruh antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat. Uji T ini digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh dari variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam Uji T dengan level 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Ada beberapa kriteria Uji T yaitu sebagai berikut :

- 1) Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima, yang artinya secara parsial variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak, yang artinya secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menentukan T_{tabel} $\alpha = 5\% : 2,5\%$ (Uji 2 sisi) dapat ditentukan dengan rumus $(\alpha / 2 ; n - k - 1) df = n - k - 1$.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Bursa Efek Indonesia (BEI)

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh jauh sebelum Indonesia dinyatakan merdeka. Pasar modal atau yang juga disebut bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan VOC. Namun karena adanya perang dunia ke I (satu) akhirnya pasar modal kemudian ditutup. Perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan sesuai yang diharapkan, hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, seperti dampak dari perang dunia 1 dan dua, perpindahan kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda ke pemerintah Indonesia, serta berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak berjalan semestinya.

Pada tahun 1977 Bursa Efek dibuka kembali dan dikembangkan menjadi bursa modal yang modern dengan menerapkan *Jakarta Automated Trading System (JATS)* yang kemudian terintegrasi dengan sistem *kliring* dan penyelesaian, serta depository saham yang dimiliki oleh PT. Kustodian Depositori Efek Indonesia (KDEI). Seiring berjalannya waktu Bursa Efek Indonesia mengalami pertumbuhan

yang baik, ditandai dengan adanya berbagai macam insentif serta regulasi yang dikeluarkan Pemerintah dalam meningkatkan operasional dari Bursa Efek Indonesia.

2. Visi dan Misi

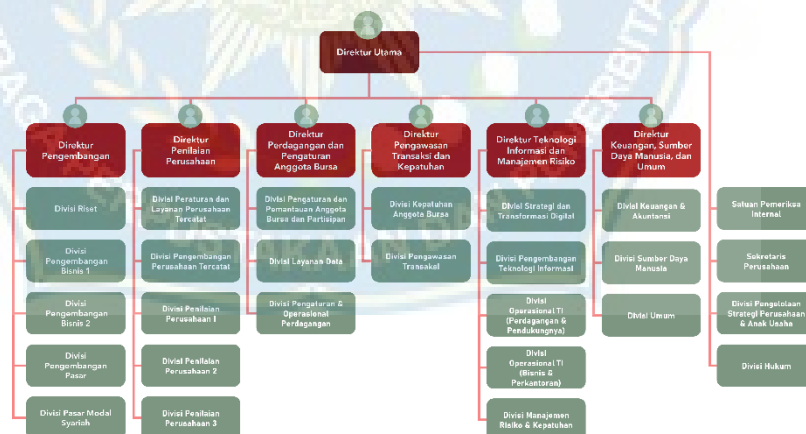
a. Visi

Visi dari Bursa Efek Indonesia ialah “Menjadi bursa yang efektif dengan kredibilitas tingkat dunia”.

b. Misi

Misi dari Bursa Efek Indonesia yaitu “ Menciptakan infrastruktur pasar keuangan yang terpercaya dan kredibel untuk mewujudkan pasar yang teratur, wajar, dan efisien, serta dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan melalui produk dan layanan yang inovatif”.

c. Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia



Sumber : www.idx.co.id

3. Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari berbagai sektor. Jumlah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah 36 perusahaan, kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 27 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan data laporan tahunan yang di ambil dari website Bursa Efek Indonesia untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusioanal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 – 2022. Berikut ini adalah gambaran umum dari sampel perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,

1. PT Aneka Tambang Tbk

PT Aneka Tambang Tbk atau yang di singkat ANTAM merupakan anggota dari MIND ID (*Mining Industry Indonesia*), BUMN ini bergerak dibidang pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. ANTAM sendiri memiliki wilayah operasi yang tersebar diseluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral. Adapun kegiatan ANTAM mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas biji nikel, feronikel, emas, perak, bauksit, serta batubara.

2. PT Krakatau Steel Persero Tbk

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini dikenal sebagai perusahaan baja terbesar di Indonesia. Perusahaan ini diresmikan pada tahun 1970, yang sebelumnya dikenal sebagai Proyek Besi Baja Trikora. Sejak berdiri, perusahaan ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, ditandai dengan bertambahnya fasilitas produksi seperti pabrik besi spons, pabrik billet baja, pabrik baja batang kawat serta fasilitas infrastruktur pendukungnya.

3. PT Semen Baturaja Persero Tbk

BUMN ini didirikan pada 14 November 1974, yang dimana 5 tahun kemudian tepatnya pada tanggal 9 November 1979 perusahaan ini berstatus Menjadi Persero dengan komposisi saham 88% milik Negara. Kemudian yang menjadi pihak pengendali dan pemilik manfaat sebenarnya (*ultimate beneficial owner*) Semen Baturaja Tbk adalah Pemerintah Republik Indonesia.

4. PT Wijaya Karya Beton Tbk

PT. Wijaya Karya Beton (PT. WIKABeton) adalah salah satu perusahaan anak PT. Wijaya Karya (WIKAK) yang khusus bergerak dalam industri beton pracetak. BUMN Ini didirikan pada tahun 1960 dengan memulai kegiatannya sebagai perusahaan instalatir listrik. emegang saham pengendali Wijaya Karya (Persero) Tbk adalah Pemerintah Republik Indonesia, dengan memiliki 1 Saham Preferen (Saham Seri A Dwiwarna) dan 65,05% di saham Seri B.

WIKA memiliki anak usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu Wijaya Karya Beton Tbk (WIKABETON) (WTON) dan Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKAGEDUNG) (WEGERE).

5. PT Waskita Beton Precast Tbk

PT Waskita Beton Precast (Waskita Precast) terbentuk resmi sebagai entitas anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Waskita) pada 7 Oktober 2014. Waskita Precast adalah perusahaan manufaktur beton *precast* dan *ready mix* dengan kapasitas produksi saat ini salah satu terbesar di Indonesia. Perseroan mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 September 2016. Setelah IPO 2016, berbagai pencapaian pun berhasil diterima oleh perusahaan, di antaranya meraih *Alpha 10th Annual Best Deal & Solution Award Southeast Asia 2016*, dengan penyerapan dana IPO sebesar Rp 5,1 triliun.

6. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI), sebelumnya bernama Holcim Indonesia adalah anak perusahaan dari PT. Semen Industri Bangunan (SIIB), yang merupakan bagian dari Semen Indonesia Group. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai produsen semen terbesar di Indonesia PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang memproduksi semen. Distribusi produk PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk ditunjukkan untuk pasar dalam negeri khususnya di pulau Jawa. PT. Solusi Bangun

Indonesia Tbk merupakan salah satu cabang dari pabrik semen yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda, Karangtalun, Cilacap, 53234 Jawa Tengah, Indonesia. Pemilihan Lokasi pabrik di cilacap didasarkan pada pertimbangan, antara lain dekatnya sumber bahan baku dan memadai, sarana transportasi yang memudahkan pengangkutan, daerah Kawasan industry, pemasaran yang dekat dan terjangkau, tenaga kerja yang relative padat dan air yang memadai dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

7. PT Perusahaan Gas Negara Tbk

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN?) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang transmisi dan distribusi gas bumi terbesar di Indonesia. PGN telah bertransformasi menjadi *subholding* gas bagian dari *holding* migas PT Pertamina (Persero) dan berdedikasi pada satu tujuan yaitu memberikan keahliannya, energi dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara jangka panjang. PGN juga terus memperkuat pondasi dan bertransformasi dari perusahaan transmisi dan distribusi gas bumi menjadi penyedia solusi energi terintegrasi, yang mendorong pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan masyarakat dan industri.

8. PT. Adhi Karya

Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) didirikan tanggal 1 Juni 1974 dan memulai usaha secara komersial pada tahun 1960.

Kantor pusat ADHI berkedudukan di Jl. Raya Pasar Minggu KM.18, Jakarta 12510 – Indonesia.

Nama Adhi Karya untuk pertama kalinya tercantum dalam SK Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja tanggal 11 Maret 1960. Kemudian berdasarkan PP No. 65 tahun 1961 Adhi Karya ditetapkan menjadi Perusahaan Negara Adhi Karya. Pada tahun itu juga, berdasarkan PP yang sama Perusahaan Bangunan bekas milik Belanda yang telah dinasionalisasikan, yaitu *Associate NV*, dilebur ke dalam Adhi Karya.

Pemegang saham pengendali Adhi Karya (Persero) Tbk adalah Pemerintah Republik Indonesia, dengan memiliki 1 Saham Preferen (Saham Seri A Dwiwarna) dan 51,00% di saham Seri B.

9. PT. Garuda Indonesia

PT Garuda Indonesia Tbk merupakan satu-satunya maskapai penerbangan milik Negara. Garuda Indonesia pertama kali mengudara, era agresi militer dilancarkan Belanda. Meski sudah memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia tetap dibayangi ancaman kependudukan oleh Belanda.

Pada 21 Desember 1949 dilaksanakan perundingan lanjutan dari hasil Konferensi Meja Bundar antara pemerintah Indonesia dengan maskapai KLM mengenai berdirinya sebuah maskapai nasional. Presiden Soekarno memilih dan memutuskan “Garuda Indonesian Airways” (GIA) sebagai nama maskapai ini.

10. PT Semen Baturaja Persero Tbk

Perusahaan lahir dengan nama PT Semen Baturaja (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 45% dimiliki oleh PT Semen Gresik dan PT Semen Padang sebesar 55%. Lima tahun kemudian, pada tanggal 9 November 1979 Perusahaan berubah status dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Persero dengan komposisi saham sebesar 88% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, PT Semen Padang sebesar 7% dan PT Semen Gresik sebesar 5%. Beberapa tahun kemudian yaitu pada tahun 1991, saham Perseroan diambil alih secara penuh oleh Pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya Perseroan terus mengalami perkembangan sehingga pada tanggal 14 Maret 2013 PT Semen Baturaja (Persero) mengalami perubahan status menjadi Perseroan terbuka dan berubah nama menjadi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

Akhir tahun 2022 menjadi milestone bersejarah bagi SMBR, di mana proses integrasi SMBR ke PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) berhasil diselesaikan dan telah melingkupi seluruh tahapan pembentukan holding BUMN Sub klaster semen yang ditandai dengan penandatanganan Akta Perjanjian Pengalihan Saham pada tanggal 19 Desember 2022 antara Negara Republik Indonesia dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di mana sebanyak 7.499.999.999 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B milik

Negara RI di SMBR beralih kepemilikannya kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, sehingga status saat ini SMBR berubah menjadi Non-Persero menjadi PT Semen Baturaja Tbk.

11. PT Presisi Tbk

PP Presisi Tbk (PPRE) sebelumnya bernama PT PP Peralatan Konstruksi (Juli 2014) dan PT PP Alat Konstruksi (Juni 2014)) didirikan pada tanggal 26 Mei 2004 dengan nama PT Prima Jasa Aldodua. Kantor pusat PP Presisi Tbk berlokasi di Plaza PP – Gedung Wisma Subiyanto, Jl. TB Simatupang No.57, Pasar Rebo, Jakarta 13760 – Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham PP Presisi Tbk, yaitu: PP (Persero) Tbk (PTPP) (76,99%) dan Koperasi KPS PT Pembangunan Perumahan (5,76%).

12. PT Kimia Farma Persero Tbk

Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah *NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co*. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF (Perusahaan Negara Farmasi) Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi

Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma (Persero).

Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma (Persero) kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dalam penulisan berikutnya disebut Perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, Perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang kedua bursa telah merger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia). Berbekal pengalaman selama puluhan tahun, Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. Perseroan kian diperhitungkan kiprahnya dalam pengembangan dan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0017895.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 dan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0115053 tanggal 28 Februari serta tertuang dalam Akta Risalah RUPSLB Nomor 18 tanggal 18 September 2019, terjadi perubahan nama perusahaan yang semula PT Kimia Farma (Persero) Tbk menjadi PT Kimia Farma Tbk, efektif per tanggal 28 Februari 2020.

13. PT Jasa Marga Persero Tbk

Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) didirikan tanggal 01 Maret 1978 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1978. Kantor pusat Jasa Marga (Persero) Tbk beralamat di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550 – Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Jasa Marga (Persero) Tbk (31-Mar-2023), yaitu: Pemerintah Republik Indonesia, dengan memiliki 1 Saham Preferen (Saham Seri A Dwiwarna) dan 70,00% di saham Seri B.

14. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk

Bank Rakyat Indonesia (BRI) termasuk kedalam golongan salah satu bank tertua di Tanah Air yang didirikan di Purwokerto, Hindia Belanda tahun 1895. Setelah kemerdekaan Negara Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia.

15. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut “BNI” atau “Bank”) pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik

Negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai Bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.

BNI merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010.

16. PT Bank Mandiri (Persero)

PT Bank Mandiri menjadi Perusahaan Perseroan yang dinyatakan dalam Akta No.9, tanggal 2 Oktober 1998, yang selanjutnya disebut PT Bank Mandiri (Persero). PT Bank Mandiri (Persero) didirikan sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140

tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia.

17. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Perbankan. Bank BTN berkomitmen menjadi Bank yang melayani dan mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui tiga produk utama, perbankan perseorangan, bisnis dan syariah. Perencanaan bisnis yang lebih terarah sebagai tujuan yang harus dicapai oleh Bank BTN untuk menjadi Bank yang terdepan dalam membantu semua kebutuhan masyarakat saat ini.

18. PT Elnusa Persero Tbk

PT Elnusa Tbk ("Perseroan") didirikan dengan nama PT Electronika Nusantara berdasarkan Akta Notaris No. 18 tanggal 25 Januari 1969 dari Tan Thong Kie, S.H., sebagaimana di ubah melalui Akta Notaris No. 10 tanggal 13 Februari 1969 dari notaris yang sama. Akta pendirian ini, yang merupakan Anggaran Dasar Perseroan, telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. J.A.5/18/24 tanggal 19 Februari 1969, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35, Tambahan No. 58 tanggal 2 Mei 1969.

Entitas induk Perseroan adalah PT Pertamina (Persero) dan entitas induk terakhirnya adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Perseroan mengawali kiprahnya sebagai pendukung operasi PT Pertamina (Persero), terutama dalam memberikan pelayanan termasuk pemeliharaan dan perbaikan, di bidang peralatan komunikasi elektronik, peralatan navigasi dan sistem radar yang digunakan oleh kapal-kapal milik Pertamina maupun kapal-kapal minyak asing yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang Migas.

19. PT Telkom Indonesia Persero Tbk

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 52.09%, sedangkan 47.91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode "TLKM" dan *New York Stock Exchange* (NYSE) dengan kode "TLK". Dalam upaya bertransformasi menjadi digital *telecommunication company*, TelkomGroup mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan (customer-oriented). Transformasi tersebut akan membuat organisasi TelkomGroup menjadi lebih lean (ramping) dan agile (lincah) dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan

efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas.

20. PT Bank Agroniaga Tbk

Sebelum menjadi Bank BRI Agroniaga, bank ini memiliki nama Bank Agro yang didirikan Dana Pensiun Perkebunan (DAPENBUN) pada 27 September 1989. Bank Agro pun memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan sektor agribisnis di Indonesia.

Bank AGRO mendapat izin dari Menteri Keuangan pada 11 Desember 1989 dan resmi beroperasi secara komersial pada 8 Februari 1990. Bank Agro menjadi perusahaan publik pada tahun 2003, sehingga namanya turut berubah menjadi PT Bank Agroniaga Tbk. Tentunya, instansi perbankan ini juga mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Surabaya.

Saham PT Bank Agroniaga Tbk baru tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 2007. Empat tahun kemudian, tepatnya pada 3 Maret 2011, Bank BRI mengakuisisi Bank AGRO dan secara resmi menjadi pemegang saham pengendali PT Bank Agroniaga Tbk. Puncaknya di tahun 2012, saat ulang tahun Bank AGRO ke-23, Bank AGRO mengubah namanya menjadi BRI Agroniaga.

21. PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) didirikan dengan nama PT Tugu Pratama Indonesia pada tanggal 28 November 1981. Kantor pusat Asuransi Tugu Pratama Indonesia

Tbk berlokasi Wisma Tugu I, Jln. H. R. Rasuna Said Kav. C 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan. Pada tanggal 17 Mei 2018, TUGU memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham TUGU (IPO) kepada masyarakat sebanyak 177.777.800 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp3.850,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 28 Mei 2018.

22. PT Phapros Tbk

PT Phapros Tbk, singkatan dari *Pharmaceutical Processing Industries*, merupakan perusahaan farmasi yang didirikan pada tanggal 21 Juni 1954 di Semarang, Jawa Tengah. Sebagai perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia, Phapros fokus pada produksi obat-obatan generik dan non-generik dengan kualitas tinggi dan harga yang terjangkau. Produk-produk Phapros mencakup berbagai kategori, obat etikal, obat generik, obat *over the counter*, fitofarmaka dan nutrisi. PT Phapros juga merupakan perusahaan BUMN dibidang farmasi yang telah berkontribusi besar dalam memajukan industri kesehatan Indonesia. Dengan komitmennya terhadap kualitas, inovasi, dan harga yang terjangkau, Phapros telah menjadi pilihan utama bagi masyarakat dan industri Farmasi.

23. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC adalah perusahaan yang menyediakan layanan terminal kendaraan yang

beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan sejumlah pelabuhan / Terminal RoRo lainnya di Indonesia. Layanan yang diberikan meliputi Terminal *Handling* dan *Value Added Services* dengan standar kualitas pelayanan kelas dunia. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dirancang khusus untuk terminal komersial yang menyediakan layanan di terminal mobil. Layanan ini termasuk *Stevedoring*, *Cargodoring*, *Receiving*, dan *Delivery*. Untuk 100% ekspor dan impor serta layanan di dalam negeri. Selain itu, terminal ini juga melayani *Value Added Services* yang meliputi *Vehicle Processing Center*, dan *Equipment Processing Center*, *Road Freight Services*, dan *Port Stock*. Lebih lanjut lagi, juga menyediakan Layanan Tol Laut atau Tol Maritim dalam mendukung program pemerintah untuk mengurangi angkutan barang yang selama ini menggunakan angkutan darat beralih menjadi angkutan laut.

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk didirikan sebagai entitas bisnis tersendiri pada tanggal 1 Desember 2012 dengan prosentase kepemilikan saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebesar 99% dan PT Multi Terminal Indonesia sebesar 1%. Sebelum menjadi entitas bisnis tersendiri, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk hanya sebuah strategic business unit yang bernama Tanjung Priok Car Terminal (TPT) yang pengelolaannya di bawah Kantor Pusat dan beroperasi sejak Juni 2007. Pada 9 Juli 2018 PT Indonesia Kendaraan Terminal resmi menjadi perusahaan publik yang melantai di Bursa Efek Indonesia sehingga kepemilikan

sahamnya berubah menjadi 71,3% oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), 0,7% oleh PT Multi Terminal Indonesia (*Sister Company*) dan 28% oleh publik atau IPCC.

24. PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Didirikan pada tanggal 1 Januari 1961 PT Waskita Karya (Persero) Tbk adalah salah satu perusahaan negara terkemuka di Indonesia yang berperan besar dalam pembangunan infrastruktur. Berasal dari sebuah perusahaan Belanda bernama "Volker Aannemings Maatschappij N.V.", yang diambil alih berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 62/1961, Waskita Karya pada awalnya berpartisipasi dalam pekerjaan proyek terkait air termasuk reklamasi, pengerukan, pelabuhan, dan irigasi.

Sejak 1973, status hukum Waskita Karya berubah menjadi "Persero" PT Waskita Karya dengan panggilan yang lebih akrab "Waskita". Sejak saat itu perusahaan mulai mengembangkan bisnisnya sebagai kontraktor umum yang terlibat dalam berbagai kegiatan konstruksi yang lebih luas termasuk jalan raya, jembatan, bandara, pabrik pengolahan limbah, pabrik semen, dan fasilitas industri lainnya.

Pada tahun 1980, Waskita mulai mengerjakan berbagai proyek yang menggunakan teknologi maju. Pengalihan teknologi dilakukan melalui aliansi bisnis berupa joint operation dan joint venture dengan perusahaan asing terkemuka. Prestasi signifikan

dan monumental yang menjadi kebanggaan nasional adalah Bandara Soekarno – Hatta, Cengkareng.

Memasuki tahun 1990 Waskita menyelesaikan berbagai proyek gedung bertingkat dengan reputasi baik seperti BNI City (gedung tertinggi di Indonesia), Gedung Kantor Bank Indonesia, Menara Graha Niaga, Menara Mandiri Plaza, Hotel Shangri-La dan beberapa apartemen bertingkat. Bangunan tersebut berada di Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia.

Waskita telah mencapai *performance* yang menonjol dalam pembangunan jembatan beton bertulang panjang dengan menggunakan sistem *balanced cantilever* dan berhasil menyelesaikan tiga jembatan cantilever yaitu jembatan Rajamandala, Jembatan Rantau Berangin, dan Jembatan Bareleng IV. Prestasi besar lainnya yang menggunakan teknologi serupa adalah pembangunan jalan layang Pasteur – Cikapayang – Surapati di Bandung, Jawa Barat. Kisah sukses yang sama juga dicapai dalam pembangunan berbagai bendungan utama seperti Pondok, Grokgak, Tilog, Gapit, dan Sumi yang selesai lebih cepat dari jadwal dengan kualitas memuaskan.

Dalam upaya Waskita berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dalam segala aktifitas dan usahanya, maka sejak November 1995 Waskita memperoleh sertifikat ISO 9002:1994. Diperolehnya sertifikat tersebut menjadi pengakuan internasional yang meyakinkan terhadap Sistem Manajemen Mutu ISO yang

diimplementasikan oleh perusahaan dan merupakan titik awal menuju era persaingan global. Pada bulan November 2009 Waskita berhasil memperbarui Sistem Manajemen Mutu dan dapat memperoleh sertifikat ISO 9001:2008. Hal ini membuktikan bahwa Waskita memahami dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan spesifik pelanggannya.

25. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) adalah perusahaan publik di Indonesia dengan mayoritas sahamnya (83,52%) dimiliki dan dikelola oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG, dimana pihak pengendali dan pemilik manfaat sebenarnya (*ultimate beneficial owner*) Perseroan adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.

PT Solusi Bangun Indonesia merupakan BUMN yang menjalankan usaha yang terintegrasi terdiri dari semen, beton siap pakai, agregat dan layanan pengelolaan limbah. SBI mengoperasikan empat pabrik semen di Narogong (Jawa Barat), Cilacap (Jawa Tengah), Tuban (Jawa Timur), dan Lhoknga (Aceh), dengan total kapasitas 14,8 juta ton semen per tahun dan mempekerjakan lebih dari 2.000 karyawan.

26. PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau dikenal dengan nama PP (Persero) Tbk (PTPP) didirikan 26 Agustus 1953 dengan nama NV Pembangunan Perumahan, yang merupakan

hasil peleburan suatu Perusahaan Bangunan bekas milik Bank Industri Negara ke dalam Bank Pembangunan Indonesia, dan selanjutnya dilebur ke dalam P.N.Pembangunan Perumahan, suatu Perusahaan Negara yang didirikan tanggal 29 Maret 1961.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham PP (Persero) Tbk (31-Mar-2022) adalah Pemerintah Republik Indonesia, dengan memiliki 1 Saham Preferen (Saham Seri A Dwiwarna) dan 51,00% di saham Seri B. Kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan oleh PTPP adalah pekerjaan pelaksanaan konstruksi dan investasi, properti, pengelolaan kawasan, instalasi bangunan gedung dan bangunan sipil, jasa perdagangan bahan komponen bangunan dan peralatan konstruksi, pengelolaan gedung, system development dan pelaksanaan pekerjaan EPC.

27. PT Indonesia Farma Tbk

PT Indonesia Farma Tbk atau disingkat PT Indofarma Tbk (yang setelah ini disebut juga dengan “Perseroan” atau “Indofarma”) telah berkiprah menjadi perusahaan farmasi dan alat kesehatan nasional selama lebih dari 10 dekade.

Di tahun 1918, berawal dari sebuah pabrik skala kecil di lingkungan Rumah Sakit Pusat Pemerintah Kolonial Belanda yang pada saat itu hanya memproduksi beberapa jenis salep dan kasa pembalut, cikal bakal PT Indonesia Farma (Persero) Tbk terbangun. Kini, Indofarma telah menjadi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendukung program Pemerintah

Indonesia untuk terus meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Pada tanggal 11 Juli 1981, status Perseroan berubah menjadi badan hukum berbentuk Perusahaan Umum Indonesia Farma (Perum Indofarma). Status Perseroan kembali berubah pada tahun 1996 menjadi PT Indofarma (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 34 tahun 1995 dengan akta pendirian berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Januari 1996 yang diubah dengan Akta No. 134 tanggal 26 Januari 1996.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Data penelitian menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia dan website resmi perusahaan terkait. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN dari berbagai sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 – 2022 sebanyak 36 perusahaan. Perusahaan tersebut kemudian diidentifikasi melalui pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel 27 perusahaan.

Terdapat satu variabel independen pada penelitian ini, yakni kepemilikan institusional (X) serta satu variabel dependen yaitu penghindaran pajak (Y).

Tabel 4. 1 Deskripsi Data Penelitian

No.	KODE PERUSAHAAN	TAHUN	X	Y
1	ANTAM	2020	0,65	0,30
		2021	0,65	0,39
		2022	0,65	0,27
2	KRAS	2020	0,80	0,21
		2021	0,80	0,03
		2022	0,80	0,88
3	SMBR	2020	0,76	0,70
		2021	0,76	0,24
		2022	0,76	0,18
4	WIKA	2020	0,60	0,06
		2021	0,60	0,04
		2022	0,60	0,31
5	WSBP	2020	0,60	0,06
		2021	0,60	0,77
		2022	0,60	0,83
6	PGAS	2020	0,57	0,22
		2021	0,57	0,22
		2022	0,57	0,21
7	ADHI	2020	0,51	0,30
		2021	0,51	0,34
		2022	0,57	0,33
8	GIAA	2020	0,89	0,04
		2021	0,89	0,14
		2022	0,89	0,34
9	PPRE	2020	0,77	0,48
		2021	0,77	0,35
		2022	0,77	0,22
10	KAEF	2020	0,90	0,72
		2021	0,90	0,26
		2022	0,90	2,90
11	JSMR	2020	0,82	1,06
		2021	0,82	0,58
		2022	0,82	0,38
12	BBRI	2020	0,57	0,30
		2021	0,57	0,19
		2022	0,53	0,20
13	BBNI	2020	0,60	0,66
		2021	0,60	0,45
		2022	0,60	0,19

14	BBTN	2020	0,60	0,29
		2021	0,60	0,21
		2022	0,65	0,21
15	ELSA	2020	0,56	0,09
		2021	0,51	0,12
		2022	0,51	0,06
16	TLKM	2020	0,52	0,24
		2021	0,52	0,22
		2022	0,52	0,24
17	AGRO	2020	0,87	0,51
		2021	0,86	0,08
		2022	0,87	0,90
18	BMRI	2020	0,60	0,25
		2021	0,52	0,20
		2022	0,52	0,20
19	IPCM	2020	0,08	0,28
		2021	0,77	0,20
		2022	0,77	0,19
20	INAF	2020	0,81	1,00
		2021	0,81	0,44
		2022	0,81	0,21
21	PPRO	2020	0,51	0,07
		2021	0,51	0,04
		2022	0,51	0,04
22	WTON	2020	0,60	0,06
		2021	0,60	0,09
		2022	0,60	1,10
23	TUGU	2020	0,58	0,12
		2021	0,58	0,10
		2022	0,58	0,06
24	PEHA	2020	0,57	0,24
		2021	0,57	0,12
		2022	0,57	0,34
25	IPCC	2020	0,68	0,15
		2021	0,68	0,40
		2022	0,71	0,29
26	WSKT	2020	0,75	0,03
		2021	0,82	0,69
		2022	0,75	0,35
27	SMCB	2020	0,98	0,33
		2021	0,84	0,34
		2022	0,84	0,28

2. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	X	Y
Mean	0.672346	0.340494
Median	0.650000	0.240000
Maximum	0.980000	2.900000
Minimum	0.080000	0.010000
Std. Dev.	0.145759	0.382625
Skewness	-0.461575	4.064339
Kurtosis	4.675286	26.08825
Jarque-Bera Probability	12.34842 0.002082	2022.106 0.000000
Sum	54.46000	27.58000
Sum Sq. Dev.	1.699654	11.71218
Observations	81	81

(Sumber : Pengolahan Data, Eviews 12)

Tabel 4.2 merupakan hasil uji statistik deskriptif dari semua variabel penelitian dengan jumlah sampel sebanyak 81. Berdasarkan tabel tersebut, analisis statistik deskriptif masing – masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

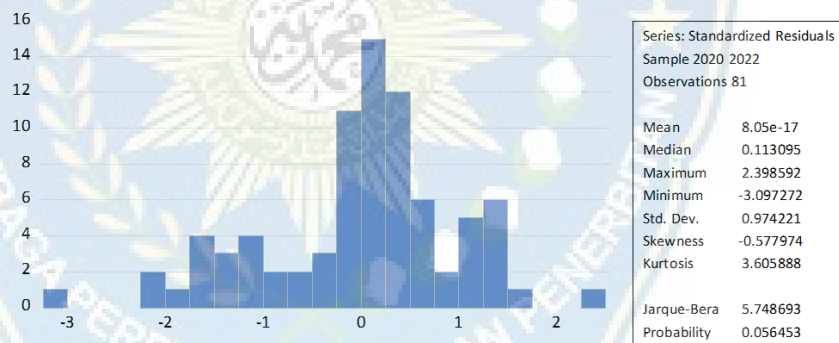
- a. Variabel Kepemilikan Institusional (X) memiliki nilai minimum atau nilai terkecil sebesar 0.080000 dan nilai maksimum atau nilai terbesar di angka 0.980000, sedangkan rata – rata sebesar 0.67234 dan standar deviasi atau yang disebut simpangan baku sebesar 0.145759.
- b. Variabel Penghindaran Pajak (Y) memiliki nilai minimum sebesar 0.010000 dan nilai maksimum 2.900000, sedangkan rata – rata sebesar 0.340494 dan standar deviasi 0.383625.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan uji normalitas untuk mengetahui apakah regresi variabel terkait berdistribusi normal atau tidak. Untuk menentukan normalnya suatu data dapat dilakukan dengan melihat nilai normalitas dari residunya. Data penelitian tersebut dikatakan normal apabila nilai probabilitasnya $> 0,05$. Sedangkan apabila nilai probabilitasnya $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas



(sumber : Pengolahan Data, Eviews 12)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas menunjukkan angka probabilitas yang lebih besar dibandingkan dengan nilai signifikansi yaitu sebesar $0,056453 > 0,05$. Maka dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Hal ini berarti bahwa sampel yang diolah ke dalam *software Eviews 12* berasal dari populasi yang normal.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan varians residual antara pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain. Jika nilai *Prob. Chi-Square* (yaitu *Obs*R-Squared*) $> 0,05$ maka tidak ada heterokedastisitas.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	0.065956	Prob. F(1,34)	0.7989
Obs*R-squared	0.069700	Prob. Chi-Square(1)	0.7918
Scaled explained SS	0.071251	Prob. Chi-Square(1)	0.7895

(Sumber : Pengolahan Data, Eviews 12)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,7918 dan 0,7895 (probabilitas $> 0,05$) yang berarti pada data penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas atau tidak terjadi ketidaksamaan varians residual pada model regresi ini.

c. Uji Autokolerasi

Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokolerasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	0.437734	Prob. F(2,32)	0.6493
Obs*R-squared	0.958673	Prob. Chi-Square(2)	0.6192

(Sumber : Pengolahan Data, Eviews 12)

Berdasarkan tabel 4.5 nilai Prob. Chi-Square(2) yaitu sebesar 0,6192 (Prob. Chi-Square(2) > 0,05) maka terima H0 sedangkan H1 ditolak, yang artinya tidak ada masalah autokolerasi pada model regresi ini.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Jadi digunakan uji t dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil uji (t) parsial dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4. 6 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.205485	0.193165	-1.063782	0.2907
X	0.812051	0.280855	2.891351	0.0050
R-squared	0.095695	Mean dependent var		0.340494
Adjusted R-squared	0.084248	S.D. dependent var		0.382625
S.E. of regression	0.366153	Akaike info criterion		0.852851
Sum squared resid	10.59138	Schwarz criterion		0.911974
Log likelihood	-32.54048	Hannan-Quinn criter.		0.876572
F-statistic	8.359913	Durbin-Watson stat		1.738922
Prob(F-statistic)	0.004952			

(Sumber : Pengolahan Data, Eviews 12)

Persamaan yang dihasilkan, yaitu :

$$Y = a + bx$$

$$Y = -0,205485 + 0,812x$$

Keterangan

Y = Penghindaran pajak

a = Nilai konstanta

b = Kepemilikan Institusional

- a. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar $-0,205485$, mempunyai arti bahwa penghindaran pajak akan bernilai $-0,20585$ jika variabel kepemilikan institusional (x) bernilai tetap atau 0.
- b. Nilai koefisien variabel x bernilai (+) $0,812051$ maka dapat diartikan bahwa jika variabel x meningkat maka variabel y juga meningkat sebesar $0,812051$.

Uji statistik t berguna untuk melihat seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen dari variabel dependen. Berdasarkan uji tersebut di tabel 4.6, maka diperoleh hasil bahwa variabel Kepemilikan Institusional (X) menunjukkan nilai t-Statistic sebesar $2,891351 > 1,66437$ t tabel dengan nilai probability $0,0050 < 0,05$, adapun nilai konstanta yang negatif tidak memengaruhi hasil pengujian variabel dependen dan variabel independen selama nilai x yang dihasilkan bukan nol (0), sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak. Dengan demikian H1 diterima.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan, maka terdapat beberapa informasi yang dapat dijelaskan dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi menjadikan penghindaran pajak dalam suatu perusahaan juga tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : Kepemilikan institusional dalam BUMN memberikan kewenangan kepada Negara untuk mengatur penghindaran pajak dalam bentuk *tax planning*. Yang dimana idealnya keberadaan kepemilikan institusional ini untuk memonitor manajemen perusahaan dalam rangka peningkatan pengawasan yang lebih optimal, akan tetapi jika institusi yang dimaksud adalah pemerintah, maka pemerintah punya kendali untuk mengontrol kebijakan internal perusahaan. Namun fakta dilapangan menjadi berbeda, hal ini tentu adanya konflik internal dimana perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai (Prinsipal) dengan manajemen Perusahaan sebagai (Agen) terkait dengan kebijakan yang diambil. Disisi lain pemerintah memiliki keinginan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui laba BUMN yang dikenakan pajak, akan tetapi disisi lain pula Perusahaan dibawah kepemilikan BUMN menginginkan pajak yang disetorkan ke kas Negara lebih rendah. Hal ini juga selaras dengan teori agensi yang digunakan dalam penelitian ini, adanya kepemilikan saham perusahaan BUMN oleh Negara menjadikan BUMN ini melakukan praktik penghindaran pajak dalam

bentuk *tax planning*, yang melibatkan manajemen perusahaan sebagai agen.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Ayu & Sumadi, 2019) dan (Mita Dewi, 2019) yang menyatakan bahwa Hasil ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusional dalam perusahaan memiliki korelasi yang kuat dengan tingkat pengawasan perusahaan tersebut. Semakin besar kepemilikan institusional, semakin ketat pula pengawasannya, dan sebaliknya, semakin kecil kepemilikan institusional, semakin longgar pengawasannya sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecurangan di dalam perusahaan. Kepemilikan institusional yang tinggi juga berhubungan dengan peningkatan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan karena kecilnya kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Pemilik institusional, berdasarkan ukuran dan hak suara yang mereka miliki, dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja ekonomi dan menghindari perilaku yang mengutamakan kepentingan pribadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka adapun yang menjadi simpulan penelitian yaitu : Kepemilikan Institusional berpengaruh Positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara atau yang disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan struktur kepemilikan saham institusional yang tinggi memiliki efek besar dalam hal kebijakan manajemen Perusahaan, salah satunya adalah strategi pajaknya. Strategi pajak dilakukan untuk meminimalkan beban pajak agar dana bisa dialihkan untuk pengembangan usaha atau sejenisnya. Selain itu potensi konflik kepentingan antara pemegang saham tertinggi (Negara) dengan kepentingan Perusahaan sangat besar terjadi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal – hal sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan diharapkan Bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan *company report* yang lebih lengkap terkait rincian pembayaran pajak perusahaan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah *variable control* seperti karakteristik perusahaan dan menambah ukuran perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif.
- Afrika, R. (2021). Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 132. <https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.3968>
- Aisyah, Rika. Soekardan, D. (2017). *Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2020)*. 4(1), 1–23.
- Amran, M. (2020). The Effects of CEO Narcissism and Leverage on Tax Avoidance. *Jurnal Mirai Management*, 5(1), 293–304.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Angelia, M. (2020). Pengaruh Profitability Dan Leverage Terhadap Cash Holding Dengan Tax Planning Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 101–120. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7414>
- Antari Yuliana, N., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 55–64. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.986>
- Ayu, P. C., & Sumadi, N. K. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 87–104. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249>
- Ayuningtyas. (2012). *PENGARUH PENGALAMAN KERJA, INDEPENDENSI, OBYEKTIFITAS, INTEGRITAS DAN KOMPETENSI TERHADAP KUALITAS HASIL AUDIT (Studi Kasus Pada Auditor Inspektorat Kota/Kabupaten di Jawa Tengah)*.
- Ayuwardani, R. P., & Isroah, I. (2018). PENGARUH INFORMASI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN TERHADAP UNDERPRICING HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN INITIAL PUBLIC OFFERING (Studi Empiris Perusahaan Go Public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19781>
- BARLI, H. (2018). Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223. <https://doi.org/10.32493/jjaup.v6i2.1956>
- Binga, W., Islamb, K., & Hossenc, M. (2019). Research in Business & Social Science. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 8(6), 292–300.

https://www.academia.edu/download/71189556/Leadership_and_Organizational_Distress_Review_of_Literature.pdf

- Dewi, L. S., & Abundanti, N. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(10), 6099. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i10.p12>
- Eforis, C. (2017). *18 Chermian Eforis*. 9(1), 18–31.
- Fitnawati Wn, S., Fitria, N., & Rahman, A. (2024). Penghindaran Pajak Dan Pencegahannya. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 191–198. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.806>
- Ghozali. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*.
- Gouwvara, N., & Susanty, M. (2023). Pengaruh Thin Capitalization Dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(2), 291–304. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i2.2078>
- Hilling, A., Lundtofte, F., Sandell, N., Sonnerfeldt, A., & Vilhelmsson, A. (2021). Tax avoidance and state ownership — The case of Sweden. *Economics Letters*, 208, 110063. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.110063>
- Ivone, I., & Tinamo, H. (2021). Pengaruh kepemilikan negara, hubungan politik dan penghindaran pajak terhadap kinerja keuangan di Indonesia. *Inovasi*, 17(4), 714–726. <https://doi.org/10.30872/jinv.v17i4.10082>
- Kalbuana, N., Purwanti, T., & Agustin, N. H. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Beban Pajak Tangguhan, dan Tingkat Pajak Efektif Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Magistra*, 100, 26–35.
- Koming, N., & Praditasari, A. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 2017(1), 1229–1258.
- Kurniawan, A., & Rahayu, N. (2022). Tantangan Pengaturan Anti-treaty Shopping di Indonesia Setelah Berlakunya Multilateral Instrument. *Owner*, 6(4), 3792–3803. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1095>
- Lastyanto, W. D., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia (2017–2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 27–40. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i1.12717>
- Mita Dewi, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012–2016. *Maksimum*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis Keputusan Transfer

Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.756>

Nurhasanah Siti. (2017). *Statistika 2*. Salemba Empat.

Pramesty, K. D., Surbakti, L. P., & Miftah, M. (2020). Kualitas Audit Eksternal Sebagai Moderasi Hubungan Antara Karakteristik Komite Audit Dan Penghindaran Pajak. *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, 1, 1005–1016.

Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen serta Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103.

Putra, E. D., & Rahayu, N. (2023). Praktik-Praktik Tax Avoidance Serta Penerapan Kebijakan Anti-Tax Avoidance Di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 524. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i3.3499>

Putri, V. R. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 21(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v21i1.8464>

Rahayu, N. (2011). Praktik Penghindaran Pajak oleh Foreign Direct Investment Berbentuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10, 171–180. <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/download/1067/1060>

Sadam Asturbewa, H., & Oktavia, R. (2023). Indikasi Perusahaan BUMN Melakukan Penghindaran Pajak. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(2), 263–279.

Salwah, S., & Herianti, E. (2019). Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 30–36. <https://doi.org/10.35592/jrb.v3i1.978>

Sari, I. P., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2023). Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan, Kompetensi Auditor Internal, Manajemen Laba: Peran Moderasi Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(1), 87–110. <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i1.15808>

Selistiaweni, S., Arieftiara, D., & Samin. (2020). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Kesulitan Keuangan, dan Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1(1), 1059–1076.

Shelvi, S., Senjaya, I. L., Gunawan, T., & Sadeli, D. (2022). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Di Bumh Yang Terdaftar Pada BEI Periode 2016-2020. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(1), 758–771. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4215>

Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi*

Akuntansi, 1(1), 66–74. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.3>

- Tambalean, F. A. K., Manossoh, H., & Runtu, T. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bei. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 465–473. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21255.2018>
- Trisakti, J. E. (2023). *DENGAN KEPEMILIKAN NEGARA SEBAGAI VARIABEL MODERASI (PADA PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG*. 3(2), 3597–3608.
- Wahyuni, S., Ariansyah, A., Khaddafi, M., & Zulkifli, Z. (2024). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Bumh Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(4), 565. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i4.11464>
- Wijaya, S., & Hidayat, H. (2022). Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Bina Ekonomi*, 25(2), 155–173. <https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5331.61-79>
- Yu, M. (2013). State ownership and firm performance: Empirical evidence from Chinese listed companies. *China Journal of Accounting Research*, 6(2), 75–





LAMPIRAN

Lampiran 1 (Tabel daftar sampel Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI 2020 – 2022)

No.	Nama Perusahaan	Sektor	Sub Sektor
1.	PT Aneka Tambang Tbk	Bahan Baku	Bahan Baku
2.	PT Krakatau Steel Persero Tbk	Bahan Baku	Bahan Baku
3.	PT Semen Baturaja Persero Tbk	Bahan Baku	Bahan Baku
4.	PT Wijaya Karya Beton Tbk	Bahan Baku	Bahan Baku
5.	PT Waskita Beton Precast Tbk	Bahan Baku	Bahan Baku
6.	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	Bahan Baku	Bahan Baku
7.	PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk	Energi	Minyak, Gas Dan Batubara
8.	PT Elnusa Tbk	Energi	Minyak, Gas Dan Batubara
9.	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Infrastruktur	Telekomunikasi
10.	PT Adhi Karya Persero Tbk	Infrastruktur	Konstruksi Bangunan
11.	PT Wijaya Karya Persero Tbk	Infrastruktur	Konstruksi Bangunan
12.	PT Jasa Marga Persero Tbk	Infrastruktur	Infrastruktur Transportasi
13.	PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk	Infrastruktur	Konstruksi Bangunan

14.	PT Garuda Indonesia Persero Tbk	Infrastruktur	Infrastruktur Transportasi
15.	PT PP Presisi Tbk	Infrastruktur	Konstruksi Bangunan
16.	PT Jasa Armada Indonesia Tbk	Infrastruktur	Infrastruktur Transportasi
17.	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	Infrastruktur	Infrastruktur Transportasi
18.	PT Indofarma Tbk	Kesehatan	Farmasi & Riset Kesehatan
19.	PT Kimia Farma Tbk	Kesehatan	Farmasi & Riset Kesehatan
20.	PT Phapros Tbk	Kesehatan	Farmasi & Riset Kesehatan
21.	PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk	Keuangan	Bank
22.	PT Bank Mandiri Persero Tbk	Keuangan	Bank
23.	PT Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk	Keuangan	Bank
24.	PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	Keuangan	Bank
25.	PT Bank Tabungan negara Persero Tbk	Keuangan	Bank
26.	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	Keuangan	Asuransi

27.	PT Waskita Karya Persero Tbk	Konstruksi Bangunan	Konstruksi Bangunan
-----	---------------------------------	------------------------	------------------------

Lampiran 2 Deskripsi data penelitian

No.	KODE PERUSAHAAN	TAHUN	X	Y
1	ANTAM	2020	0,65	0,30
		2021	0,65	0,39
		2022	0,65	0,27
2	KRAS	2020	0,80	0,21
		2021	0,80	0,03
		2022	0,80	0,88
3	SMBR	2020	0,76	0,70
		2021	0,76	0,24
		2022	0,76	0,18
4	WIKA	2020	0,60	0,06
		2021	0,60	0,04
		2022	0,60	0,31
5	WSBP	2020	0,60	0,06
		2021	0,60	0,77
		2022	0,60	0,83
6	PGAS	2020	0,57	0,22
		2021	0,57	0,22
		2022	0,57	0,21
7	ADHI	2020	0,51	0,30
		2021	0,51	0,34
		2022	0,57	0,33
8	GIAA	2020	0,89	0,04
		2021	0,89	0,14
		2022	0,89	0,34
9	PPRE	2020	0,77	0,48
		2021	0,77	0,35
		2022	0,77	0,22
10	KAEF	2020	0,90	0,72
		2021	0,90	0,26
		2022	0,90	2,90
11	JSMR	2020	0,82	1,06
		2021	0,82	0,58
		2022	0,82	0,38
12	BBRI	2020	0,57	0,30
		2021	0,57	0,19
		2022	0,53	0,20

13	BBNI	2020	0,60	0,66
		2021	0,60	0,45
		2022	0,60	0,19
14	BBTN	2020	0,60	0,29
		2021	0,60	0,21
		2022	0,65	0,21
15	ELSA	2020	0,56	0,09
		2021	0,51	0,12
		2022	0,51	0,06
16	TLKM	2020	0,52	0,24
		2021	0,52	0,22
		2022	0,52	0,24
17	AGRO	2020	0,87	0,51
		2021	0,86	0,08
		2022	0,87	0,90
18	BMRI	2020	0,60	0,25
		2021	0,52	0,20
		2022	0,52	0,20
19	IPCM	2020	0,08	0,28
		2021	0,77	0,20
		2022	0,77	0,19
20	INAF	2020	0,81	1,00
		2021	0,81	0,44
		2022	0,81	0,21
21	PPRO	2020	0,51	0,07
		2021	0,51	0,04
		2022	0,51	0,04
22	WTON	2020	0,60	0,06
		2021	0,60	0,09
		2022	0,60	1,10
23	TUGU	2020	0,58	0,12
		2021	0,58	0,10
		2022	0,58	0,06
24	PEHA	2020	0,57	0,24
		2021	0,57	0,12
		2022	0,57	0,34
25	IPCC	2020	0,68	0,15
		2021	0,68	0,40
		2022	0,71	0,29
26	WSKT	2020	0,75	0,03
		2021	0,82	0,69
		2022	0,75	0,35
27	SMCB	2020	0,98	0,33

		2021	0,84	0,34
		2022	0,84	0,28

Lampiran 3 T Tabel

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

df	Pr	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26		0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27		0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28		0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29		0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30		0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31		0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32		0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33		0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34		0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35		0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36		0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37		0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38		0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39		0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40		0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

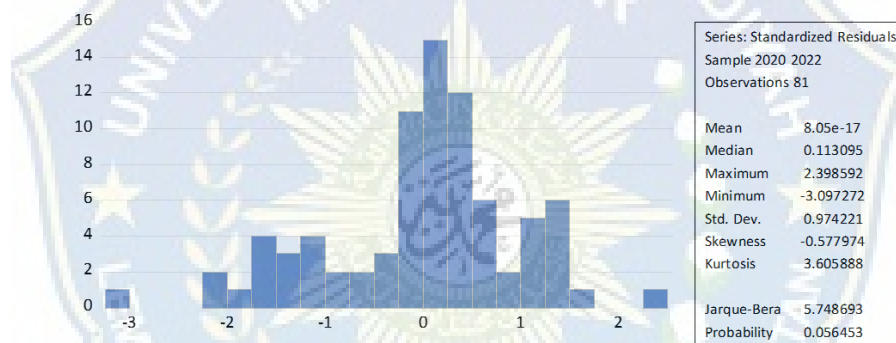
df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
		0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41		0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42		0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43		0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44		0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45		0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46		0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47		0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48		0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49		0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50		0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51		0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52		0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53		0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54		0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55		0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56		0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57		0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58		0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59		0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60		0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61		0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62		0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63		0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64		0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65		0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66		0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67		0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68		0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69		0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70		0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71		0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72		0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73		0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74		0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75		0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76		0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77		0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78		0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79		0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80		0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Lampiran 4 (Output Hasil Penelitian Menggunakan *Eviews 12*)

1. Hasil uji Statistik Deskriptif

	X	Y
Mean	0.672346	0.340494
Median	0.650000	0.240000
Maximum	0.980000	2.900000
Minimum	0.080000	0.010000
Std. Dev.	0.145759	0.382625
Skewness	-0.461575	4.064339
Kurtosis	4.675286	26.08825
Jarque-Bera	12.34842	2022.106
Probability	0.002082	0.000000
Sum	54.46000	27.58000
Sum Sq. Dev.	1.699654	11.71218
Observations	81	81

2. Hasil Uji Normalitas



3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.065956	Prob. F(1,34)	0.7989
Obs*R-squared	0.069700	Prob. Chi-Square(1)	0.7918
Scaled explained SS	0.071251	Prob. Chi-Square(1)	0.7895

4. Hasil Uji Autokolerasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.437734	Prob. F(2,32)	0.6493
Obs*R-squared	0.958673	Prob. Chi-Square(2)	0.6192

5. Hasil Uji t

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/15/24 Time: 14:46
 Sample: 2020 2022
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 27
 Total panel (balanced) observations: 81


Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.205485	0.193165	-1.063782	0.2907
X	0.812051	0.280855	2.891351	0.0050
R-squared	0.095695	Mean dependent var		0.340494
Adjusted R-squared	0.084248	S.D. dependent var		0.382625
S.E. of regression	0.366153	Akaike info criterion		0.852851
Sum squared resid	10.59138	Schwarz criterion		0.911974
Log likelihood	-32.54048	Hannan-Quinn criter.		0.876572
F-statistic	8.359913	Durbin-Watson stat		1.738922
Prob(F-statistic)	0.004952			

Lampiran dokumentasi penelitian


The screenshot displays the IDX website interface for financial reporting. The main heading is 'Laporan Keuangan dan Tahunan'. Below the heading, there are search and filter options. The 'Jenis Laporan' section has 'Laporan Tahunan' selected. The 'Jenis Efek' section has 'Saham' selected. The 'Tahun' section has '2020' selected. The 'Periode' section has 'Triwulan 1' selected. The page also features a 'RESET' button and a 'Terapkan' (Apply) button.



Lampiran surat izin penelitian



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
GALERI INVESTASI BEI UNISMUH MAKASSAR
 Gedung Menara IQRA Lt.2, Jl. Sultan Alauddin No. 259
 Makassar – 90221 Telp. (0411) 866972, Faxmle (0411) 865588;
 Mobile +62852-1112-2153 Email: galeriinvestasibei.unismuh@gmail.com



Makassar, 7 Februari 2024
26 Rajab 1445 H

Nomor : 024/GI-U/II/2024
Hal : Jawaban Permohonan Penelitian

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
 Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb

Sehubungan dengan surat dari Lembaga Penelitian Pengembangan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Nomor 3488/05/C.4-VIII/II/1445/2024. Maka bersama ini disampaikan, hal-hal sebagai berikut:

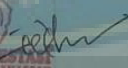

- Bahwa Galeri Investasi BEI-Unismuh Makassar bersedia untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian:

Nama	: Misykaatul Munirah
Stambuk	: 105731100820
Program Studi	: Akuntansi
Judul Penelitian	: "Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2020-2022)"
- Agar memahami prosedur Trading di BEI, maka peneliti diwajibkan membuka RDN di GI BEI Unismuh Makassar.

Demikian jawaban kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Fastabiquil khaerat,

Pembina
Galeri Investasi BEI-Unismuh Makassar



Dr. A. Ifayani Haanurat
 NBM: 857 606

Lampiran Surat Keterangan Bebas Plagiasi


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Facc.(0411) 865588


SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
 Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Misykaatul Muntrah
 Nim : 105731100820
 Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
 seperlunya.

Makassar, 09 Juli 2024
 Mengetahui,
 Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


 Nur Hafid Nurhidayah, M.L.P.
 UPT Perpustakaan dan Penerbitan 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90221
 Telephone (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
 Website: www.library.umh.ac.id
 E-mail : [mailto:info@umh.ac.id]

BAB I Misykaatul Munirah

105731100820

by TahapTutup



Submission date: 09-Jul-2024 08:55AM (UTC+0700)

Submission ID: 2414109583

File name: BAB_I_MISYKAATUL_MUNIRAH.docx (26.76K)

Word count: 869

Character count: 5952

AB I Misykaatul Munirah 105731100820

ORIGINALITY REPORT

10%	9%	8%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	3%
2	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	3%
3	digilib.perbanas.id Internet Source	2%
4	I Ketut Yudana Adi. "PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM, KESADARAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK". Journal of Applied Management and Accounting Science, 2020 Publication	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



BAB II Misykaatul Munirah

105731100820

by TahapTutup



II Misykaatul Munirah 105731100820

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

34%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejurnal.tumri.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	3%
3	ejurnal.stie-trianandra.ac.id Internet Source	3%
4	library.unismuh.ac.id Internet Source	3%
5	e-journal.trisakti.ac.id Internet Source	2%
6	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	2%
7	journal.feb.unmul.ac.id Internet Source	2%
8	repository.unesa.ac.id Internet Source	2%
9	Submitted to Trisakti University Student Paper	2%

BAB III Misykaatul Munirah

105731100820

by Tahap Tutup



Submission date: 09-jul-2024 08:57AM (UTC+0700)
Submission ID: 2414110142
File name: BAB_III_MISYKAATUL_MUNIRAH.docx (33.43K)
Word count: 1359
Character count: 7951

AB III Misykaatul Munirah 105731100820

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.trisakti.ac.id

Internet Source

2%

2

Submitted to University of Wellongong

Student Paper

2%

3

repo.undiksha.ac.id

Internet Source

2%

4

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

2%

5

j-innovative.org

Internet Source

2%

6

docplayer.info

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography



BAB IV Misykaatul Munirah

105731100820

by TahapTutup





BAB V Misykaatul Munirah

105731100820

by TahapTutup



Submission date: 09-Jul-2024 08:58AM (UTC +0700)

Submission ID: 2414110678

File name: BAB_V_MISYKAATUL_MUNIRAH.docx (14,63K)

Word count: 156

Character count: 1048

AB V Misykaatul Munirah 105731100820

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

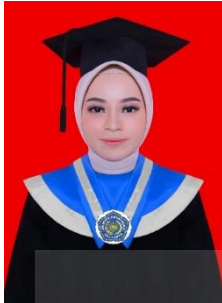
1	repository.umsu.ac.id Internet Source	LULUS	5%
---	------------------------------------------	-------	----

turnitin

Exclude quotes: Off
Exclude bibliography: Off
Exclude matches: Off

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BIOGRAFI PENULIS



MISYKAATUL MUNIRAH. Panggilan Ika lahir di Kabupaten Bantaeng pada tanggal 20 Maret 2002 dari pasangan Bapak Ahyat dan Ibu Sitti Nafsiah. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. Monumen Emmysaelan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 10 Pasorongi lulus pada tahun 2014, MTS DDI Mattoanging Bantaeng lulus pada tahun 2017, SMKN 1 Bantaeng lulus pada tahun 2020 dan mulai melanjutkan pendidikan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

